

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memiliki tujuan pembangunan Nasional yaitu terciptanya suatu masyarakat yang sejahtera. Untuk itu, sangat dibutuhkan dana anggaran yang besar dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut. Untuk mencapai pembangunan tersebut maka pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan, khususnya yaitu penerimaan dari sektor pajak. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2019 pajak merupakan salah satu sektor penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbesar di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kebijaksanaan pemerintahan yang menginginkan pembangunan nasional yang harus dibiayai dari sumber dana yang berasal dari masyarakat itu sendiri sebagai upaya guna mengurangi tingkat ketergantungan pinjaman dari luar negeri dan meningkatkan kemandirian negara.

Sejak dilakukannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, maka sistem perpajakan yang sebelumnya adalah *official assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menjadi *self assessment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan

wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem perpajakan seperti ini memberikan kepercayaan bagi wajib pajak sendiri untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak sebenarnya terutang atau yang akan dibayar. Undang- Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000 sesuai dengan sistem ini aparat pajak atau fiskus berkewajiban memberikan pelayanan, pembinaan, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peran serta masyarakat ataupun wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun masih ada saja wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga menimbulkan tunggakan pajak akibat tidak melunasi utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai aparat perpajakan, sudah seharusnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan agar wajib pajak mematuhi peraturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Apabila terjadi kelalaian pada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, aparat perpajakan seharusnya mengeluarkan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Penetapan dan ketetapan pajak ini merupakan dasar penagihan Menurut Undang-Undang Pajak No. 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, menetapkan dan ketetapan pajak diterbitkan dalam bentuk :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar wajib pajak sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan maka terhadap wajib pajak akan dilakukan teguran bila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari masih juga tidak melunasi utang pajaknya maka wajib pajak akan dipaksa untuk melunasi utang pajaknya melalui Surat Paksa. Surat Paksa memiliki kekuatan Eksekutorial.

Apabila masih belum melunasi utang pajaknya dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah menerima surat paksa, maka akan dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik wajib pajak. Dalam melakukan penyitaan, pihak fiskus dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus mengeluarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP). SPMP ini merupakan dasar hukum untuk melakukan penyitaan. Adapun maksud dari penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan hutang pajak dari wajib pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilakukan terhadap semua barang wajib pajak baik yang berada di dalam daerah kerja KPP (Kantor Pelayanan Pajak) maupun yang di luar daerah kerja KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang bersangkutan dan prinsip penyitaan dilakukan terhadap sejumlah barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Pelaksanaan sita dilakukan oleh 2 orang saksi dan wajib pajak atau yang mewakilinya. Setelah melakukan penyitaan, Juru Sita Pajak (JSP)

membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) dimana berita acara ini harus ditanda tangani oleh Jurusita Pajak (JSP), saksi dan wajib pajak.

Harus diakui bahwa sangat sulit melakukan tindakan penyitaan tersebut karena banyak Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang selalu berusaha untuk menghindari semaksimal mungkin agar tidak mengalami penyitaan. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kerap kali menyembunyikan segala aset yang dimiliki baik barang berharga, uang tunai, saldo rekening bank, surat berharga dan aset lainnya serta tidak mau menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) karena ketidakpahaman Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan tata cara penyitaan serta hak dan kewajibannya merupakan salah satu kendala yang dihadapi Jurusita Pajak (JSP).

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menyajikan tugas akhir dengan judul **“TATA CARA PELAKSANAAN SITTA TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN UNTUK MENGURANGI TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SIDOARJO”**

1.2 Tujuan Studi Lapang

Target atau tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan studi lapang yaitu untuk mengetahui Tata Cara Pelaksanaan Sita Terhadap Wajib Pajak Badan dan untuk Mengurangi Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo

1.3 Manfaat Studi Lapang

Terdapat manfaat studi lapang yang bisa diberikan untuk beberapa pihak yaitu:

a. Bagi Penulis

Penulis dapat mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan sita terhadap wajib pajak badan untuk mengurangi tunggakan pajak pada kantor pelayanan pajak madya Sidoarjo dengan benar.

b. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan dan informasi bagi pembaca bagaimana tata cara pelaksanaan sita terhadap wajib pajak badan untuk mengurangi tunggakan pajak dengan baik dan benar serta dapat sebagai referensi untuk penulis yang lainnya

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo

Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang baik antara Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo dengan Perguruan Tinggi serta membantu Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan tugasnya.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Penulis melakukan pembatasan mengenai pembahasan masalah ini, maka penulis hanya membahas tentang bagaimana tata cara pelaksanaan sita terhadap wajib pajak badan untuk mengurangi tunggakan pajak pada Kantor pelayanan pajak madya Sidoarjo periode 2018

1.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam memperoleh data tersebut maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a) Observasi, Penulis akan melakukan pengamatan langsung, pencatatan secara teliti dan sistematis pada kantor pelayanan pajak madya Sidoarjo dan dalam studi lapang tersebut
- b) Wawancara, merupakan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dalam metode ini, data diperoleh dan dikumpulkan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pegawai kantor pelayanan pajak madya sidoarjo yang menangani bagaimana tata cara pelaksanaan sita terhadap wajib pajak badan untuk mengurangi tunggakan pajak
- c) Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan melalui dokumen-dokumen dengan contoh Laporan Kegiatan Penyitaan atau sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penulisan laporan ini.